



Evaluation Of The Strategic Policies Of The Jokowi Government Volume 2

[Evaluasi Kebijakan Strategis Pemerintahan Jokowi Jilid 2]

Faizzatul Lailiyah¹⁾, Ilmi Usrotin Choiriyah, M. AP ^{*,2)}

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: ilmiusrotin@umsida.ac.id

Abstract. *This study aims to determine the extent to which policy evaluations have successfully achieved national goals and provided tangible benefits to society. The main focus of this research is to measure the extent to which strategic policies during Jokowi's second term have successfully achieved national goals and delivered real benefits to the public. Method: This study employs a literature review method; this approach was chosen because the research focuses on examining, reading, and analyzing various written sources to understand policies, theories, and empirical data without conducting field data collection. The study concentrates on evaluating strategic policies during President Joko Widodo's second term using six evaluation indicators according to William Dunn, namely effectiveness, efficiency, adequacy, precision, responsiveness, and equity. This focus was chosen to analyze the extent to which these policies are able to achieve national development goals, provide tangible impacts for the community, and address priority issues in the fields of economy, infrastructure, digital governance, and human resource transformation. Primary data consists of official government reports in the form of Laws, Government Regulations, Presidential Regulations, and the National Long-Term Development Plan. Novelty: The novelty of this research lies in the effort to conduct a comprehensive evaluation of the strategic policies of the Jokowi government in the second term.*

Keywords - Program evaluation, governance, economic development, human resource development, public policy Evaluasi

Abstract. *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana evaluasi kebijakan telah berhasil mencapai tujuan nasional dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengukur sejauh mana kebijakan strategis periode kedua Jokowi telah berhasil mencapai tujuan nasional dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Metode: Penelitian ini menggunakan metode studi literatur, pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada penelusuran, pembacaan, dan analisis berbagai sumber tertulis untuk memahami kebijakan, teori, dan data empiris tanpa melakukan pengumpulan data lapangan. Penelitian ini berfokus pada evaluasi kebijakan strategis masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo jilid dua dengan menggunakan enam indikator evaluasi menurut William Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, ketepatan, responsivitas, dan pemerataan. Fokus ini dipilih untuk menganalisis sejauh mana kebijakan-kebijakan tersebut mampu mencapai tujuan pembangunan nasional, memberikan dampak nyata bagi masyarakat, serta menjawab permasalahan prioritas dalam bidang ekonomi, infrastruktur, pemerintahan digital, dan transformasi sumber daya manusia. Data primer berupa laporan resmi pemerintah berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Kebaruan: Kebaruan penelitian ini terlihat dari upaya untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan strategis pemerintah Jokowi pada periode kedua.*

Kata Kunci - Evaluasi program, pemerintahan, Pengembangan ekonomi, Pengembangan sumber daya manusia, Kebijakan publik

I. PENDAHULUAN

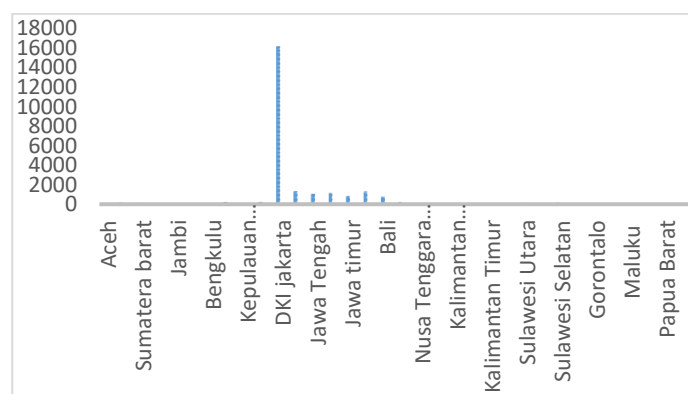
Kepemimpinan sebagai sebuah aspek utama pada sebuah negara agar terus maju dan teratur. Pemimpin berfungsi untuk mengarahkan dan mengajak masyarakat untuk terus tumbuh dan berkembang serta melindungi masyarakat dalam setiap masalah dan membantu menunjukkan penyelesaian dari masalah yang berlangsung pada masyarakat.[1] Pada Pemilihan presiden pada tahun 2019, Joko Widodo kembali terpilih menjadi presiden dalam masa jabatan kedua serta didampingi oleh K.H. Ma'ruf Amin menjadi wakil presiden serta dilantik ketika 20 Oktober 2019 untuk masa jabatan 2019-2024. Selama masa jabatan keduanya, Presiden Joko Widodo tidak sekedar mengarah terhadap pembangunan fisik namun juga berfokus dalam meningkatkan kemampuan masyarakat Indonesia agar bisa menjadi semakin unggul dan dapat bersaing dengan negara lain.[2] Presiden Joko Widodo memastikan bahwa selama masa jabatan keduanya, ia mampu fokus pada lima prioritas dengan akan dilaksanakan pada lima tahun mendatang. Prioritas tersebut diantaranya, pertama, pengembangan sumber daya manusia (SDM) menuju Indonesia secara unggul. Menurut penjelasan pokok yang dijelaskan pada RPJMN 2020-2024, SDM unggul mengarah terhadap keadaan sumber daya manusia Indonesia secara sehat, cerdas, mudah beradaptasi, terampil, dan berkarakter. Konsep SDM unggul tidak

hanya dipahami sebagai peningkatan jumlah pekerja yang berpendidikan tetapi juga mencakup aspek kesehatan, keterampilan, produktivitas, daya saing global, dan karakter bangsa. Pemerintah menekankan bahwa bonus demografi Indonesia hanya bisa menjadi kekuatan apabila didukung oleh individu yang sehat, berpendidikan, kompeten, dan berintegritas.

Di bidang ketenagakerjaan, program Kartu Pra-Kerja diluncurkan melalui Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020. Program Kartu Pra-Kerja merupakan program pengembangan kemampuan kerja yang ditargetkan kepada pencari kerja, pekerja dengan terdapat pemutusan hubungan kerja serta pekerja dengan memerlukan peningkatan keterampilan. Lewat program ini pemerintah memberi uang tunai serta pelatihan agar orang bisa menambah keterampilan dalam suatu bidang. Kedua, untuk terus meningkatkan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi sebagai aktifitas dengan dilaksanakan oleh sebuah negara dalam memajukan ekonomi masyarakat serta membawa kemajuan untuk kehidupan masyarakat. Negara berusaha untuk menaikkan pendapatan masyarakat dalam kurung waktu yang lama dan disertai perbaikan dalam sistem kelembagaan. Berdasarkan teori ini, dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi membawa kemajuan bagi masyarakat, yaitu pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Dalam praktiknya, pembangunan ekonomi di suatu negara selalu disertai dengan pembangunan infrastruktur yang terus-menerus dijalankan oleh pemerintah untuk mendorong roda pembangunan. [3]

Kedua, meneruskan pembangunan tambah ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah setiap aktifitas dengan dilaksanakan sebuah negara yang bertujuan mengembangkan kegiatan ekonomi serta taraf hidup masyarakatnya taau dengan kata lain, pembangunan ekonomi sebagai sebuah tahapan dengan berdampak terhadap peningkatan pendapatan rill per kapita penduduk sebuah negara pada periode panjang dengan diikuti terhadap perbaikan sistem kelembagaan. Berdasarkan teori tersebut maka dapat disimpulkan mengenai pembangunan ekonomi membawa perkembangan bagi masyarakat, yaitu menurunnya angka kemiskinan dan meningkatnya kesejahteraan. Pelaksanaan konkritnya, perkembangan ekonomi dalam sebuah negara selalu diimbangi dengan pembangunan infrastruktur yang selalu diupayakan oleh negara dalam menggerakkan roda pembangunan.[4] ketiga adalah penyederhanaan semua bentuk hambatan regulasi. Undang-undang omnibus law adalah bentuk regulasi yang menyatukan banyak undang-undang ke dalam satu kesatuan. Tujuan pemerintah membuat undang-undang omnibus law merupakan menyatukan 1.244 pasal dengan 79 undang-undang menjadi satu aturan untuk mempermudah sistem hukum. Salah satu regulasi yang termasuk pada omnibus law merupakan undang-undang ketenagakerjaan. Dalam rancangan undang omnibus law ada 11 hal yang akan dirubah yaitu kemudahan izin usaha, aturan investasi, jam kerja, tenaga kerja asing, hak dan perlindungan kerja, jenis pemutusan hubungan kerja dan penguatan jaminan sosial.

Keempat adalah Penyederhanaan birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan suatu hal penting yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pegawai dan pemerintahan agar lebih bagus dari sebelumnya, caranya adalah dengan menggunakan teknologi agar pelayanan publik berjalan lebih cepat serta lebih mudah. Pada era dengan semakin maju pemerintah diharapkan dapat menerapkan sistem e-government agar urusan administrasi jadi lebih singkat juga pelayanan masyarakat bisa digunakan semua kalangan.[5] Kelima adalah transformasi ekonomi. Transformasi ekonomi adalah upaya strategis untuk menggeser ketergantungan Indonesia dari ekonomi berbasis sumber daya menuju ekonomi manufaktur dan jasa modern dengan nilai tambah tinggi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penguatan transformasi dapat memberikan kontribusi yang bagus untu kemajuan ekonomi karena banyaknya usia masyarakat yang masih produktif, agar kesempatan ini benar-benar terwujud pemerintah perlu mengubah struktur ekonomi menjadi lebih kuat lewat pembangunan industri. Strategi penting dalam pembangunan industri adalah mengelola sumber daya alam agar nilainya menjadi semakin tinggi dan dapat bermanfaat untuk negara. Disisi lain tidak dapat dipungkiri bahwa semua program Kerja Jokowi dinyatakan berhasil, ada pula yang dinilai gagal karena karena belum mencapai tujuan kebijakan, Misalnya adalah kebijakan program pembangunan Ibu Kota Nusantara.



Gambar 1. Diagram Kepadatan Penduduk per Provinsi di Indonesia

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa Tingkat kepadatan penduduk di DKI Jakarta mencapai angka yang sangat tinggi dibandingkan provinsi lain, sehingga menimbulkan berbagai tekanan terhadap ruang, infrastruktur, dan kualitas hidup masyarakat. Sebaliknya, wilayah-wilayah di Kalimantan, terutama Kalimantan Utara, memiliki tingkat kepadatan penduduk yang sangat rendah, dengan lahan yang masih luas dan potensi pengembangan ruang yang besar. Kondisi ini dinilai merupakan salah satu alasan penyebab Presiden Jokowi memindahkan Ibukota ke daerah Kalimantan Timur. Tujuannya adalah untuk mengurangi kepadatan Kota Jakarta dan ingin melakukan pemerataan pembangunan agar tidak bpusat pada daerah Jawa dan sekitarnya.[6] Ibu Kota Nusantara terletak di provinsi Kalimantan Timur yang memiliki total luas wilayah sebesar 256.000 hektar namun tidak semua wilayah tersebut terdiri dari kawasan hutan karena ada yang dimanfaatkan untuk aktivitas pertambangan dan izin pemanfaatan lahan perusahaan sekitar 57% dari total area. Pemerintah menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan pada area IKN yaitu minimal 75% wilayahnya terdiri dari kawasan hijau namun wilayah yang berupa hutan hanya berjumlah 43%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kawasan yang akan dijadikan IKN telah mengalami *deforestasi*. Proses pembangunan infrastruktur di IKN diperkirakan menambah sekitar 30 persen *deforestasi* tambahan juga berpotensi memperparah kondisi lingkungan. Salah satu penyebab terjadinya perubahan pada situs hidrologi adalah deforestasi. Kerusakan siklus hidrologi akan berdampak pada pencemaran air dan kekeringan. Ketika terjadi kekeringan dan pencemaran air, maka biaya ekonomi untuk mendapatkan air akan melambung tinggi. Hutang merupakan salah satu ancaman berskala besar dalam pembangunan infrastruktur di IKN, hal ini dikarenakan pemerintah sering kali mengalokasikan dana dalam jumlah besar untuk pembangunan dan mengurangi jumlah anggaran untuk sektor lain menjadi lebih sedikit dari biasanya. Pada tahun 1998 hingga 2017 kondisi keuangan negara pernah tidak seimbang dikarenakan pemerintah terlalu berfokus untuk menyelesaikan proyek yang belum rampung. Akibatnya negara terpaksa melakukan pinjaman dalam jumlah yang besar agar pembangunan terus berlangsung. Sampai saat ini pemerintah sering kali mengambil pinjaman jangka pendek dalam mendanai proyek jangka panjang.

Sebuah studi pendahuluan berjudul “Refleksi atas Kinerja Pemerintahan Presiden Jokowi Selama Tiga Tahun Masa Jabatan Kedua” telah dilakukan. Penelitian ini menunjukkan bahwa masa jabatan kedua Presiden Jokowi tidak berjalan lancar akibat pandemi COVID-19, yang memiliki dampak luas dan mendalam tidak sekedar dalam bidang kesehatan namun juga dalam ekonomi, kondisi sosial, juga stabilitas nasional secara keseluruhan. Selain itu, studi berjudul “Jokowi dan Komunikasi: Refleksi atas Kepemimpinan Presiden Periode Kedua” menekankan bahwa masa jabatan kedua Presiden Jokowi tidak berjalan lancar karena COVID-19. Terdapat ucapan dari pemerintah tentang covid 19 yang malah dijadikan bahan bercandaan tersebar luas di kalangan masyarakat. Pernyataan pemerintah tentang hal penting lain seperti undang-undang cipta kerja juga ramai diperbincangkan hingga akhirnya menimbulkan konflik. [7] Penelitian selanjutnya yang berjudul “Perbandingan Kebijakan Pemerintah pada Masa Jabatan Pertama dan Kedua Jokowi Ditinjau dari Teori Utilitarian” menekankan bahwa selama kepemimpinan Joko Widodo, dari periode pertama hingga periode kedua, berbagai upaya dan kebijakan yang dilaksanakan telah berhasil mencapai tingkat keadilan dan manfaat yang signifikan bagi masyarakat luas. Pemerintah berupaya mewujudkan kebijakan yang tidak sekedar mengarah terhadap mengejar pertumbuhan ekonomi namun juga fokus terhadap manfaat yang adil bagi semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan daerah yang kurang berkembang.[8]

Berdasarkan masalah dan penelitian sebelumnya yang sudah diraikan tersebut, penelitian ini terdapat tujuan yaitu mengkaji program kerja Jokowi yang berhasil adalah karena program tersebut memberikan dampak positif yang nyata untuk negara dan masyarakat. Berbeda dengan program yang mengalami kegagalan, program yang sukses dapat digunakan sebagai referensi pemerintah untuk merancang dan mengevaluasi agar manfaat program bisa berdampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kunci kesuksesan program agar bisa digunakan untuk program lain dan bisa digunakan sebagai referensi untuk membuat program yang lebih bagus dan bermanfaat untuk semua orang. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan yang mengidentifikasi enam faktor utama yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan. Faktor pertama adalah efektivitas, yang menilai seberapa jauh tindakan berhasil mencapai tujuan yang diharapkan. Kriteria ini fokus pada pencapaian hasil yang diinginkan secara teknis. Faktor kedua adalah efisiensi, yang mengukur sejauh mana usaha, biaya, atau sumber daya dengan diperlukan dalam mencapai tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi mengacu pada hubungan diantara hasil yang dipakai dengan sumber daya yang digunakan, dengan tujuan memaksimalkan hasil dengan pengeluaran minimal. Faktor ketiga adalah kecukupan, yaitu melihat seberapa jauh kebijakan yang sudah efektif memenuhi kebutuhan, nilai, atau peluang dalam menangani isu yang ada. Dengan kata lain, ini mengukur apakah hasil kebijakan benar-benar memenuhi kebutuhan yang ada secara memadai. Faktor keempat adalah menilai sejauh mana biaya dan manfaat dari suatu kebijakan didistribusikan secara adil atau merata di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Hal ini terkait dengan keadilan sosial dari dampak kebijakan. Faktor kelima adalah mengevaluasi sejauh mana hasil kebijakan sejalan dengan dan memenuhi kebutuhan, preferensi, atau nilai yang dimiliki oleh kelompok sasaran kebijakan. Faktor keenam adalah menilai apakah hasil yang diinginkan benar-benar berguna dan bagi sasaran kebijakan.

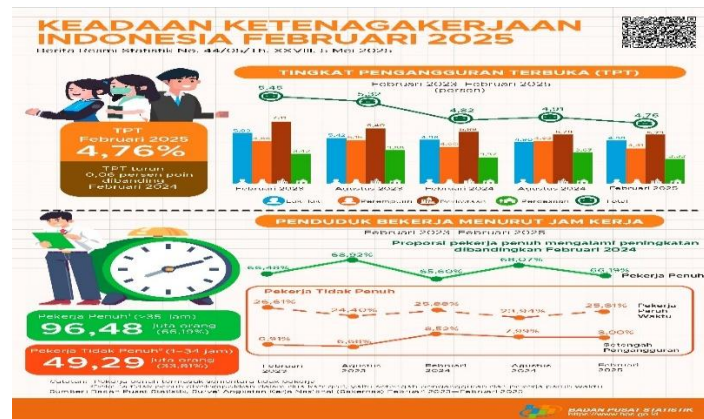
II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur, pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada penelusuran, pembacaan, dan analisis berbagai sumber tertulis untuk memahami kebijakan, teori, dan data empiris tanpa melakukan pengumpulan data lapangan. Penelitian ini berfokus pada evaluasi kebijakan strategis masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo jilid dua dengan menggunakan enam indikator evaluasi menurut William Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, ketepatan, responsivitas, dan pemerataan. Fokus ini dipilih untuk menganalisis sejauh mana kebijakan-kebijakan tersebut mampu mencapai tujuan pembangunan nasional, memberikan dampak nyata bagi masyarakat, serta menjawab permasalahan prioritas dalam bidang ekonomi, infrastruktur, pemerintahan digital, dan transformasi sumber daya manusia. Data primer berupa laporan resmi pemerintah berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan kebijakan strategis Presiden Joko Widodo pada periode kedua. Literatur yang digunakan meliputi buku, jurnal ilmiah, laporan resmi pemerintah, serta dokumen analisis kebijakan. Beberapa buku dan dokumen yang menjadi dasar analisis antara lain buku Transformasi Ekonomi dan Investasi Smelter Nikel sebagai acuan kebijakan hilirisasi, RPJMN 2020–2024, pengembangan SDM unggul, laporan Kementerian Pendidikan mengenai Program Indonesia Pintar, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai dasar penyederhanaan regulasi, serta buku dan laporan terkait implementasi OSS-RBA dan transformasi birokrasi digital. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Studi literatur dilakukan dengan menghimpun berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian, baik dari buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, laporan penelitian, maupun dokumen resmi pemerintah. Proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan. Langkah pertama adalah mengidentifikasi sumber literatur berupa mengumpulkan referensi ilmiah seperti jurnal, artikel, dan hasil penelitian sebelumnya yang mencakup 5 kebijakan strategis pada masa pemerintahan Jokowi periode 2. Kedua adalah melakukan seleksi literatur berupa menelusuri jurnal-jurnal yang berkaitan dengan lima program kerja Presiden Joko Widodo melalui Google Scholar. Penelusuran dilakukan menggunakan kata kunci yang relevan untuk memastikan literatur yang diperoleh sesuai dengan fokus penelitian. Ketiga adalah melakukan eksplorasi dan pembacaan kritis berupa Membaca, memahami, dan menelaah berbagai dokumen yang terkait dengan lima program kerja Presiden Joko Widodo yang dinilai berhasil pada periode kedua. Keempat adalah melakukan pencatatan data berupa mencatat poin-poin penting, kutipan, teori serta temuan pendukung dari setiap literasi. Langkah terakhir adalah melakukan klasifikasi tematik berupa mengelompokkan data berdasarkan 5 program Jokowi yang berhasil.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas

Efektivitas menurut William Dunn adalah konsep yang merujuk pada sejauh mana hasil yang telah ditentukan sebelumnya dapat direalisasikan secara optimal. Dengan kata lain, efektivitas adalah ukuran keberhasilan dalam memperoleh tujuan dengan sudah ditentukan sebelumnya ketika pelaksanaan sebuah tindakan atau kebijakan. Konsep ini sangat terkait dengan aspek rasionalitas teknis, di mana pelaksanaan tindakan harus dilakukan dengan pendekatan yang logis, sistematis, dan efisien agar hasil yang diharapkan dapat dicapai secara maksimal.[9] Program Kartu Prakerja merupakan usaha pemerintah Indonesia untuk meningkatkan keikutsertaan dan produktivitas orang-orang di dunia kerja. Program ini ditujukan mampu mendukung menurunkan pandangan *negatif* serta meningkatkan kesadaran masyarakat pada waktu pandemi COVID-19.[9] Covid-19, yang menyebar ke Indonesia, memberikan pukulan berat bagi perekonomian yang kemudian memengaruhi sektor ketenagakerjaan. Terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang meluas hampir merata di semua sektor industri, mulai dari pariwisata, transportasi, perdagangan, konstruksi dan hal ini membuat ketahanan ekonomi di bidang kerja menjadi sangat lemah, terutama untuk pekerja yang mengandalkan uang dari gaji harian.



Gambar 2. Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia

Menurut data tersebut, dapat dilihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia ketika Februari 2025 dibuktikan sejumlah 4,76 persen, terdapat penurunan sejumlah 0,06 poin persentase daripada ketika Februari 2024, dengan sejumlah 4,82 persen. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi ketenagakerjaan, meskipun perubahannya masih tergolong kecil. Data ini juga menunjukkan tren penurunan yang konsisten sejak Februari 2023, ketika tingkat pengangguran terbuka masih berada pada 5,45 persen. Penurunan tingkat pengangguran terbuka ini merupakan indikator positif yang menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja melalui program kartu pra-kerja mulai membuahkan hasil.

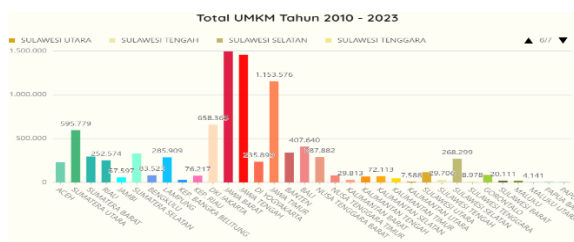
Selain itu, program lain yang memberikan kontribusi signifikan terhadap indikator efektivitas menurut teori William Dunn juga ditemukan, yaitu pembangunan infrastruktur. Selama masa kepresidenan Joko Widodo, pembangunan infrastruktur sebagai salah satu fokus penting dengan mendapatkan perhatian besar dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Pemerintah menyadari bahwa infrastruktur yang memadai merupakan landasan penting bagi kemajuan suatu negara, terutama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan hubungan antar wilayah, dan mempermudah penyebaran barang dan jasa di seluruh Indonesia. Berbagai jenis infrastruktur, baik berupa fasilitas seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara, maupun infrastruktur pendukung seperti sistem transportasi massal dan jaringan listrik, telah menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional.[11]



Gambar 3. Jumlah Anggaran Pembangunan Infrastruktur

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa anggaran untuk pembangunan infrastruktur berfluktuasi dari tahun 2015 hingga 2022. Pada periode 2015 hingga 2018, anggaran ini meningkat secara signifikan, mencapai Rp394 triliun. Namun, pada tahun 2019, anggaran tetap sama atau stagnan, kemudian menurun drastis pada tahun 2020 menjadi Rp281 triliun karena dana dialihkan untuk penanganan COVID-19. Meskipun terjadi penurunan anggaran, pemerintah tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur sebagai fondasi pembangunan nasional. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya anggaran secara substansial pada tahun 2021, yang mencapai Rp417 triliun. Perubahan anggaran ini menunjukkan dinamika pengelolaan keuangan negara, tetapi juga mencerminkan tekad pemerintah untuk terus memprioritaskan pembangunan infrastruktur meskipun menghadapi krisis. Secara keseluruhan, pembangunan infrastruktur pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam membuka akses wilayah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomidan kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera. Pemerintah terus menegaskan komitmen untuk melanjutkan dan memperluas program infrastruktur ini, agar Indonesia dapat keluar dari status negara berkembang menuju negara maju dengan sistem ekonomi yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan di masa depan.

Program selanjutnya yang juga relevan dengan indikator efektivitas adalah terkait kebijakan omnibus law, dimana pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) untuk dijadikan terobosan besar di bidang ketenagakerjaan dan investasi. UU ini menyatukan berbagai aturan dari banyak undang-undang menjadi satu regulasi terpadu untuk mempermudah usaha, melindungi pekerja, serta memberdayakan koperasi dan UMKM. Pemerintah juga mewajibkan penerbitan aturan pelaksana dalam waktu maksimal tiga bulan dengan melibatkan 20 kementerian dan lembaga agar tercipta ekosistem investasi dan dunia kerja yang lebih kondusif.[12] Maka dengan adanya Omnibus Law ini memudahkan bagi para pengusaha untuk membuka suatu usaha, salah satunya yaitu UMKM. Alasan mengapa Omnibus law ini dapat memudahkan pelaku usaha untuk membuka usaha adalah terjadinya penyederhanaan aturan-aturan untuk mempermudah pembuatan izin usaha. Investor dari luar negeri juga bisa mendapatkan izin usaha lewat online single submission, jadi tidak perlu lagi untuk mengurus ke banyak lembaga pemerintah.



Gambar 4. Jumlah Keseluruhan Total UMKM Tahun 2010-2023

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa jumlah UMKM dari tahun 2010 hingga 2023 mengalami peningkatan yang signifikan, dengan konsentrasi terbesar berada di Pulau Jawa seperti Jawa Tengah (1.153.576), Jawa Barat (1.500.000), dan Jawa Timur (1.450.000). Namun, masih terdapat kesenjangan yang cukup lebar dengan provinsi di luar Jawa, seperti Papua (4.141), Maluku Utara (8.978), dan Gorontalo (20.111). Sebelum adanya Omnibus Law, banyak UMKM terkendala birokrasi dalam memperoleh izin usaha. Dengan hadirnya OSS (Online Single Submission) UMKM dapat lebih cepat memperoleh legalitas. Selanjutnya program yang relevan dengan indikator efektivitas adalah program oss. Oss merupakan bukti nyata birokrasi untuk perizinan dalam bidang usaha sudah berubah. Oss bukanlah aplikasi digital biasa, melainkan tanda bahwa birokrasi di Indonesia yang dulunya lama dan ribet menjadi lebih modern dalam mendukung investasi online single submission adalah aplikasi sistem untuk mengurus perizinan yang dikeluarkan oleh lembaga terkait atas nama menteri, pimpinan lembaga, Gubernur lewat sistem online yang telah mencakup semuanya. Melalui sistem ini, proses perizinan dapat dilakukan secara simultan, sehingga pelaku usaha dapat segera memulai kegiatan produksi sembari melengkapi dokumen pendukung lainnya seperti izin lokasi, IMB, izin lingkungan, dan persyaratan lainnya seperti Standar Nasional Indonesia.[13]



Gambar 5. Indeks SPBE Tahun 2021 dan 2023

Berdasarkan data diatas Kenaikan Indeks SPBE tahun 2021–2023 di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten menunjukkan bahwa proses transformasi birokrasi digital di Indonesia semakin nyata dan merata. Hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah semakin siap mengadopsi sistem pemerintahan berbasis elektronik, baik dari aspek regulasi, tata kelola, maupun implementasi layanan publik digital merupakan salah satu faktor pendorong utama kenaikan tersebut adalah penerapan digitalisasi perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS) RBA. Kehadiran OSS telah merevolusi wajah birokrasi perizinan di Indonesia dengan memangkas prosedur yang panjang, mengurangi biaya administrasi, serta menghapus praktik birokrasi yang berbelit. Program terakhir yang relevan adalah terkait dengan indikator efektivitas adalah program hilirisasi ekspor. Hilirisasi merupakan bentuk usaha untuk mengurangi ekspor bahan mentah serta mengajak industri dalam negeri dalam menggunakan bahan mentah dan mengolahnya untuk menjadi barang yang bernilai lebih tinggi. Hilirisasi dilakukan untuk untuk mengolah biji nikel sebelum dijual menjadi barang setengah jadi. Dalam tujuan yaitu dalam meningkatkan nilai ekonomi dari bijih nikel tersebut ke dalam produk dalam nilai tambah secara lebih besar.[14]



Gambar 6. Dampak hilirisasi terhadap perkembangan ekspor produk turunan nikel

Kebijakan hilirisasi nikel pada masa kepemimpinan Jokowi jilid dua, yang dimulai dengan larangan ekspor bijih nikel mentah sejak tahun 2020, telah membawa perubahan besar bagi perekonomian Indonesia karena berhasil menggeser orientasi dari sekadar mengeksport bahan mentah ke arah produksi barang olahan yang memiliki nilai tambah tinggi, seperti feronikel, stainless steel, hingga bahan baku baterai kendaraan listrik, dan hal ini terbukti dari peningkatan nilai ekspor produk turunan nikel yang melonjak sangat tajam dari sekitar US\$ 11,7 miliar pada tahun 2020 menjadi lebih dari US\$ 33 miliar pada tahun 2022–2023. Kebijakan tersebut juga mampu menarik investasi asing langsung dalam jumlah besar dari negara mitra seperti Tiongkok dan Korea Selatan untuk pembangunan smelter yang membutuhkan energi sangat besar dan menghasilkan limbah, serta risiko terlalu bergantung pada satu komoditas tanpa diimbangi dengan diversifikasi sektor lain seperti pertanian modern, manufaktur teknologi, dan ekonomi kreatif. Selanjutnya penelitian terdahulu oleh Ardhito Bramandika Putra Dkk., Pande Made Rony Kurniawan, Trismadi, Andrian Andaya Lestari [15] yang berjudul *“Kepemimpinan Strategis di Masa pemerintahan Joko Widodo Dalam Menyelesaikan Pandemi Covid-19 di Indonesia untuk Mendukung Pertahanan Negara”* menunjukkan bahwa kepemimpinan Presiden Joko Widodo ketika menghadapi pandemi Covid-19 bersifat efektif secara strategis, adaptif dalam implementasi, dan mampu menjaga keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi. Walaupun terdapat tantangan di fase awal, pada akhirnya strategi yang ditempuh pemerintah berhasil membawa Indonesia keluar dari puncak krisis pandemi dengan hasil yang diakui baik secara nasional maupun internasional.

B. Efisiensi

Efisiensi pada dasarnya berkenaan dengan sejauh mana jumlah penggunaan sumber daya dengan terdapat mampu digunakan dengan maksimal dalam menghasilkan suatu tingkat efektivitas tertentu dalam pencapaian tujuan. Dengan kata lain, efisiensi menunjukkan hubungan kuat antara hasil yang ingin dicapai serta sumber daya yang dimanfaatkan. Artinya semakin sedikit sumber daya alam yang dimanfaatkan maka akan menghasilkan hasil yang sama atau malah lebih besar. Berdasarkan data BPS Februari 2025 yang dikaitkan dengan indikator efisiensi dapat disimpulkan bahwa Program Kartu Prakerja terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap perbaikan kondisi ketenagakerjaan nasional. Hal ini dapat dilihat dari penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 5,45% ketika Februari 2023 menjadi 4,76% ketika Februari 2025. Efisiensi Kartu Prakerja dapat dilihat dari berbagai sisi. Pertama, dari sisi biaya, program ini menggunakan anggaran yang relatif lebih kecil dibandingkan metode pelatihan konvensional, namun mampu menjangkau lebih dari 18 juta penerima di seluruh Indonesia. Efisiensi biaya ini juga diperkuat dengan sistem digitalisasi penuh (pendaftaran, pelatihan, hingga insentif), yang menekan biaya administrasi lebih dari 50% menurut Bappenas. Kedua, dari sisi waktu, Kartu Prakerja mempercepat proses rekrutmen, pelatihan, dan penyaluran insentif. Jika pada program pelatihan konvensional peserta membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk mendaftar dan mengikuti tatap muka, Prakerja mampu memangkas waktu tersebut dengan pendaftaran daring serta penyaluran insentif yang rata-rata cair dalam 3–5 hari. Hal ini menunjukkan bahwa program berhasil menciptakan efisiensi temporal yang mendukung percepatan penciptaan lapangan kerja.

Program selanjutnya yang juga relevan dengan indikator efisien adalah Online Single Submission (OSS). OSS merupakan penerapan transformasi birokrasi yang berhubungan tentang sistem perizinan berusaha berbasis elektronik yang diluncurkan pemerintah Indonesia sejak 2018, dan diperbarui menjadi OSS Berbasis Risiko (OSS-RBA) pada 2021. Sistem ini dikelola oleh Kementerian Investasi/BKPM dan menjadi instrumen utama dalam reformasi birokrasi perizinan usaha. OSS mempermudah untuk memberikan izin usaha menjadi semakin mudah lewat kemajuan zaman sehingga memberikan kemudahan juga mempercepat proses perizinan usaha, dengan demikian sebagai pelaku UMKM diuntungkan dengan kemudahan pengurusan izin dan syarat agar bisa punya usaha sendiri.

Tabel 1. Jumlah Penerbitan Nomor Induk Berusaha

Bulan	Jumlah NIB Terbit
Januari 2024	256.128
Februari 2024	342.260
Maret 2024	617.633
April 2024	491.226
Mei 2024	424.138
Juni 2024	272.771
Juli 2024	294.657
Agustus 2024	289.640
September 2024	272.820
Total	3.261.273

Sumber: Diolah dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2024

Berdasarkan data penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) sepanjang Januari hingga September 2024, tercatat sebanyak 3.261.273 NIB sudah diterbitkan dari sistem Online Single Submission (OSS). Jumlah tersebut menunjukkan adanya capaian output yang cukup signifikan dengan rata-rata sekitar 362 ribu NIB per bulan. Puncak tertinggi terjadi pada Maret 2024 dengan 617.633 NIB, sedangkan jumlah terendah tercatat pada Januari 2024 dengan 256.128 NIB. Setelah Maret, penerbitan NIB relatif stabil dengan kisaran 270–295 ribu per bulan hingga September 2024. Dengan menggunakan penerapan oss membuat penerbitan nib menjadi lebih cepat, mudah dan terukur tanpa harus menggunakan banyak biaya seperti sistem manual dulu. Selanjutnya penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Cornelia Evelin Cabui dengan judul “Refleksi Kinerja Pemerintahan Presiden Jokowi Selama Tiga Tahun Pada Periode Kedua Pemerintahan” telah dilakukan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa perjalanan periode kedua Presiden Jokowi tidak berjalan mulus karena adanya covid-19 yang memberikan dampak luas dan mendalam tidak hanya terhadap sektor kesehatan, tetapi juga perekonomian, sosial, dan stabilitas nasional secara keseluruhan. Pada indikator ini ditemui bahwa program program terkait sudah berhasil dengan adanya penerapan program secara efisien hal ini dapat dilihat dari terjadinya percepatan dalam hal penciptaan lapangan pekerjaan untuk kartu prakerja serta mempermudah perizinan dengan adanya program oss.

C. Kecukupan

Merupakan salah indikator evaluasi kebijakan yang digunakan dalam mengetahui hasil yang dipeorleh pada sebuah kebijakan publik untuk mengatasi besarnya masalah yang menjadi sasaran kebijakan. Dengan demikian, kecukupan tidak hanya sekedar mengukur keberhasilan kebijakan dalam mencapai tujuan, tetapi juga menekankan pada proporsionalitas antara hasil kebijakan dengan kebutuhan nyata masyarakat. sebuah kebijakan dapat dinilai efektif karena mampu menghasilkan perubahan tertentu, namun belum tentu memadai apabila dampak yang ditimbulkan hanya sebagian kecil dan tidak mampu menjawab keseluruhan masalah. Oleh karena itu, kecukupan menilai apakah manfaat kebijakan seimbang dengan besar masalah, serta apakah kebijakan tersebut memberikan solusi yang substantif, signifikan, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Pada tahun 2020 pemerintah menerapkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai instrumen untuk memperkuat kebijakan hilirisasi. Melalui regulasi ini, pemerintah memberikan kepastian hukum dan kemudahan investasi melalui OSS berbasis risiko, serta memberikan berbagai insentif fiskal dan nonfiskal bagi pembangunan smelter. Selain itu, UU Cipta Kerja memasukkan hilirisasi sumber daya alam, termasuk nikel, sebagai bagian dari Program Strategis Nasional. Indonesia mempunyai cadangan nikel terbanyak hingga jadi yang ketiga terbanyak dalam dunia. Nikel teresebar ke sekitar daerah Sulawesi, Maluku, Halmahera, Papua dan Kalimantan. Karena cadangan nikel di indonesia yang jumlah nya banyak, indonesia berpotensi untuk menjadi salah satu pembuat nikel paling besar di indonesia, yang dapat memberikan dampak positif untuk berbagai sektor industri seperti baja tahan karat, baterai, dan logam paduan.

Tabel 2. Daftar negara dengan Sumber Daya Nikel Terbanyak

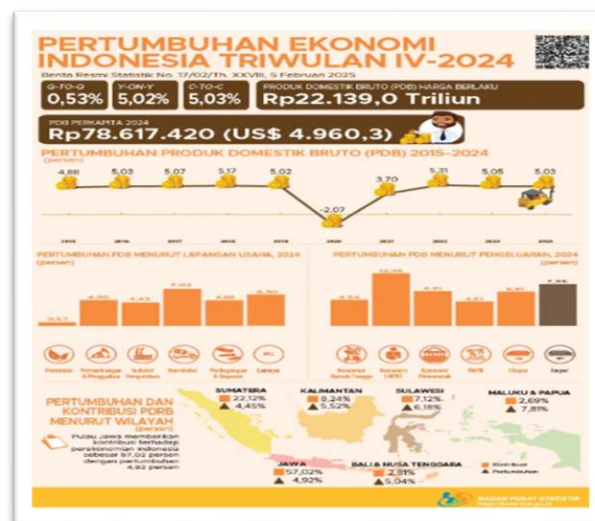
Urutan	Negara	Cadangan mineral
1	Indonesia	52%
2	Australia	15%
3	Brazil	8%
4	Rusia	5%
5	Filiphina	20%
6	China	20%

Sumber: Diolah dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia

Sebelum ekspor mineral dihentikan pada awal tahun 2020, kebanyakan nikel di kirim ke luar negeri dalam bentuk mentah sehingga pemanfaatannya dirasa kurang maksimal. Kemudian Indonesia melakukan hilirisasi nikel yang berakibat kerugian pada industri yang ada di uni Eropa, mengingat pemberhentian penjualan nikel oleh Indonesia dilakukan hingga mampu memproduksi nikel menjadi barang setengah jadi. Kebijakan ini bertujuan untuk Indonesia tidak sekedar sebagai pengekspor bahan mentah, melainkan mampu menguasai rantai pasok global dengan menghasilkan produk bernilai tambah lebih tinggi seperti feronikel, stainless steel, hingga bahan baku baterai kendaraan listrik. Hilirisasi ini juga membuka peluang besar bagi Indonesia untuk menarik investasi asing langsung ke sektor *smelter* dan industri turunan nikel. Banyak investor dari Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang menanamkan modal untuk membangun pabrik pengolahan di dalam negeri, sehingga menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan penerimaan negara, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain kunci dalam transisi energi global. Dengan adanya hilirisasi, nilai ekspor nikel melonjak signifikan, dari sekitar US\$ 11,7 miliar pada 2020 menjadi lebih dari US\$ 33 miliar pada 2022–2023. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Iwan Sumiarsa dkk., Iwan Sumiarsa, Hidayat, Siti Nur Azijah, Yussp Supendi, Muhammad Husein Maruapey, Agus Suarman Sudarsa [16] yang berjudul “*Evaluasi Kepemimpinan Presiden Joko Widodo Menjelang Akhir Masa Jabatan*” menunjukkan bahwa kebijakn Jokowi belum sepenuhnya memadai dalam masalah pembangunan nasional. Pada indikator ini bisa disimpulkan bahwa adanya program hilirisasi nikel dapat menambah lapangan pekerjaan, menarik investasi dari negara asing, dan meningkatkan pendapatan negara

D. Ketepatan

Ketepatan berfokus pada tujuan dari suatu program dan seberapa kuat alasan dibalik tujuan tersebut. Menurut Wiliam Dunnn kelayakan digunakan untuk memilih program yang paling cocok dari beberapa program pilihan yang adaserta mempertimbangkan hasil dan tujuan yang paling masuk di akal sehat. Kelayakan berfokus pada isi dari tujuan bukan ke cara untuk melakukan tujuan. Pembangunan infrastruktur merupakan modal penting dalam hal kemajuan ekonomi untuk memajukan ekonomi negara serta serta membuat hidup masyarakat menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Pada era kepemimpinan Jokowi, Indonesia mengalami banyak kemajuan dalam pembangunan infrastruktur agar semua orang di Indonesia lebih muda untuk terhubung kemana saja. Hal tersebut dapat dilihat dari pesatnya pembangunan jalan tol di Indonesia. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Osman Nur Chaidin dengan judul “*Jokowi Dan Komunikasi: Sebuah Refleksi Kepemimpinan Periode Kedua Sang Presiden telah dilakukan*”. Penelitian tersebut menunjukan bahwa perjalanan periode kedua sang Presiden tidak berjalan lancar dikarenakan wabah covid-19, Beerapa kebijakan baru seperti undang-undang cipta kerja menimbulkan konflik karena adanya ketidaksinkronan komunikasi antara pemerintah dengan Masyarakat. Pada indikator ini bisa disimpulkan bahwa program Pembangunan infrastruktur dinilai tepat karena terbuti adanya peningkatan pada sektor kontruksi tumbuh dan transportasi. Pembangunan juga mulai menyebar ke daerah selain Jawa seperti Sulawesi, Maluku dan Papua.



Gambar 7. Data Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Pembangunan infrastruktur pada masa Presiden Joko Widodo jilid II dapat dikategorikan cukup memadai. Hal tersebut diketahui pada keberhasilan pembangunan jalan tol, pelabuhan, transportasi massal, bendungan, hingga elektrifikasi desa yang berdampak langsung pada turunnya biaya logistik nasional dari 23–24% PDB menjadi 14,3% pada 2022. Data BPS 2024 juga menunjukkan sektor konstruksi tumbuh 7,02% dan transportasi 4,86%, yang membuktikan bahwa infrastruktur benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi. Pembangunan ekonomi membawa perkembangan bagi masyarakat, yaitu menurunnya angka kemiskinan dan meningkatnya kesejahteraan. Selain itu, pemerataan pembangunan mulai terasa dengan pertumbuhan ekonomi di luar Jawa, seperti Sulawesi (6,18%) serta Maluku dan Papua (7,81%), yang lebih tinggi dari rata-rata nasional (5,03%). Namun, kecukupan pembangunan ini belum sepenuhnya optimal karena Jawa masih mendominasi PDB nasional (57,02%) dan masih ada tantangan berupa beban fiskal serta dampak lingkungan. Dengan demikian, meskipun pembangunan infrastruktur Jokowi sudah cukup memadai dalam menjawab masalah utama bangsa, masih diperlukan langkah lanjutan untuk memperkuat pemerataan wilayah, menjaga keberlanjutan anggaran, dan mengurangi dampak lingkungan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Osman Nur Chaidin dengan judul “Jokowi Dan Komunikasi : Sebuah Refleksi Kepemimpinan Periode Kedua Sang Presiden” telah dilakukan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa perjalanan periode kedua sang Presiden tidak berjalan lancar dikarenakan wabah covid-19, Beerapa kebijakan baru seperti undang-undang cipta kerja menimbulkan konflik karena adanya ketidaksinkronan komunikasi antara pemerintah dengan Masyarakat. Pada indikator ini bisa disimpulkan bahwa program Pembangunan infrastruktur dinilai tepat karena terbuti adanya peningkatan pada sektor kontruksi tumbuh dan transportasi. Pembangunan juga mulai menyebar ke daerah selain jawa seperti Sulawesi, Maluku dan Papua.

E. Responsivitas

Responsivitas pada kebijakan publik mampu dimaknai menjadi bentuk tanggapan atau reaksi yang muncul dari kelompok sasaran terhadap pelaksanaan suatu kebijakan tertentu. Tanggapan ini mencerminkan seberapa jauh kebijakan tersebut dapat menjawab kebutuhan faktual. Harapan serta aspirasi masyarakat yang menjadi target dari kebijakan tersebut. Menurut William N. Dunn, responsivitas merupakan salah satu indikator penting dalam evaluasi kebijakan, yang berfokus terhadap seberapa besar kebijakan mampu memenuhi dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan, kepercayaan, dan kesukaan oleh kalangan masyarakat. [17] Pada bidang perizinan lahirnya oss merupakan bentuk respon pemerintah terhadap keluhan yang selama ini dirasakan oleh pelaku usaha. Sebelum adanya oss proses perizinan dilakukan secara manual, membutuhkan waktu yang cukup panjang karena harus mengurus perizinan ke banyak instansi, biaya yang dibutuhkan juga cukup banyak karena proses nya panjang dan berbelit-belit. Melalui sistem digital, oss mampu membuat perizinan bisa selesai hanya dalam hitungan hari atau jam, biaya nya juga lebih terjangkau. Berdasarkan data Bps Maret 2025 yang berkaitan dengan indikator responsivitas pada program oss terbukti mampu menjawab masalah utama birokrasi dalam perizinan yang lambat dan mahal, sekaligus merespon kebutuhan para pelaku usaha UMKM. Hal ini dapat dilihat dari jumlah nomor induk berusaha yang semakin hari semakin bertambah banyak. Sampai dengan 20 Maret 2024, Total NIB terbit sampai pada 8.131.284 dengan dominasi oleh usaha mikro sejumlah 7.809.8609. Data ini menunjukkan pertumbuhan NIB yang berkontribusi dalam mendorong kemajuan ekonomi nasional dan formalisasi usaha. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kamila dengan judul “Komparasi Kebijakan Pemerintah Masa Kepemimpinan Jokowi Periode Pertama dan Kedua Dilihat

Dari Teori Utilitarian”, dimana pada penelitian terdahulu ditemukan bahwa berbagai upaya dan kebijakan yang diimplementasikan telah berhasil. Pemerintah berusaha mewujudkan kebijakan yang juga berfokus pada pemerataan manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan daerah-daerah. Ditemukan pada indikator responsivitas bahwa hal ini sesuai dengan hasil yang ditemui pada penelitian terdahulu diatas, dimana berbagai upaya yang dilakukan dalam kebijakan berfokus pada pemerataan manfaat kepada masyarakat hal ini pada indikator responsivitas ditemui adanya kebijakan terkait oss.

F. Perataan

Menurut William N. Dunn, konsep perataan memiliki hubungan yang erat antara aturan yang adil dengan kehidupan sosial Masyarakat, kebijakan publik tidak hanya harus sah secara hukum, tetapi juga harus adil secara sosial. Perataan merujuk pada bagaimana manfaat maupun beban kebijakan didistribusikan secara seimbang di antara berbagai kelompok secara berbeda, baik berdasarkan kelas sosial, wilayah, maupun tingkat ekonomi. Dengan demikian, kebijakan yang bertujuan untuk membuat keadilan bagi semua kalangan adalah kebijakan yang tidak hanya mengejar efektivitas atau efisiensi, tetapi juga memastikan adanya distribusi manfaat yang setara dan adil, sehingga kelompok yang lemah atau kurang beruntung tetap mendapatkan perlindungan dan kesempatan yang sama dalam menikmati hasil pembangunan. Sebelum program ini dijalankan, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berpusat di Pulau Jawa, sementara wilayah lain seperti Papua, Maluku, dan Sulawesi tertinggal dari sisi konektivitas maupun akses pembangunan. Melalui pembangunan jalan tol lintas wilayah, pelabuhan, bandara, bendungan, serta program elektrifikasi desa, pemerintah berusaha memastikan hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata. Data BPS tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Maluku & Papua mencapai 7,81% dan Sulawesi 6,18%, lebih tinggi dari rata-rata nasional 5,03%, menandakan bahwa manfaat pembangunan mulai dirasakan di wilayah luar Jawa. Selain itu, pembangunan infrastruktur dasar diantaranya jalan desa, irigasi, listrik, maupun bendungan juga memperlihatkan adanya distribusi manfaat yang lebih merata hingga ke pedesaan. Pembangunan kawasan industri di luar Jawa, seperti Morowali (Sulawesi) dan Halmahera (Maluku Utara), juga memberikan kesempatan kerja baru yang lebih merata. Penelitian terdahulu Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Iwan Sumiarsa dkk., Iwan Sumiarsa, Hidayat, Siti Nur Azizah, Yussup Supendi, Muhammad Husein Maruapey, Agus Suarman Sudarsa yang berjudul “Evaluasi Kepemimpinan Presiden Joko Widodo Menjelang Akhir Masa Jabatan” menunjukkan bahwa kebijakan Jokowi belum sepenuhnya memadai dalam masalah pembangunan nasional. Pada indikator Perataan ditemukan bahwa Pembangunan infrastruktur tidak hanya terjadi di Jawa dan mulai menyebar ke daerah lain seperti Maluku, Papua.

II. SIMPULAN

Evaluasi Kebijakan Strategis Masa Kepemimpinan Jokowi Jilid 2 telah berjalan atau terimplementasi dengan baik melalui enam aspek utama: efektivitas, efisiensi, kecukupan, ketetapan, responsivitas, dan ketetapan. Efektivitas kebijakan bisa dilihat dari keberhasilan program seperti kartu prakerja, pembangunan infrastruktur, omnibus law mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efisiensi program dapat dinilai dari program yang dijalankan terbukti mampu menekan waktu, tenaga, dan biaya seperti program kartu prakerja. Kecukupan program dapat dilihat dari hasil suatu program dapat mengatasi masalah yang ada, hilirisasi nikel tidak hanya menambah nilai ekspor tetapi berpotensi juga untuk menambah lapangan kerja. Ketepatan dapat dinilai dari program Pembangunan infrastruktur yang dinilai secara nyata sudah sesuai dengan indikator ketepatan karena adanya peningkatan pada berbagai sektor terkait. Responsivitas program telah dilakukan untuk menjawab harapan, kebutuhan nyata, serta aspirasi masyarakat seperti program oss yang hadir menjawab keluhan para pelaku usaha tentang birokrasi yang panjang. Perataan program dapat dilihat dari program yang menjangkau semua lapisan masyarakat, pembangunan infrastruktur di luar Jawa terbukti berhasil mengurangi ketimpangan pembangunan dan menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di wilayah Maluku, Papua, dan Sulawesi dibandingkan rata-rata nasional. Untuk memperkuat keberlanjutan kebijakan strategis di masa mendatang, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program secara lebih komprehensif.

REFERENSI

- [1] MUHAMMAD RIFAI ZEIN HUSEIN, *Model Kepemimpinan Nasional Joko Widodo Perspektif Ibnu Khaldun*. 2024. [Online]. Available: https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/79720/1/11180453000029_M.RIFAI ZEIN HUSEIN.pdf
- [2] C. E. Cabui, “Refleksi Kinerja Pemerintahan Presiden Jokowi Selama Tiga Tahun Pada Periode Kedua Pemerintahan,” *J. Adhikari*, vol. 1, no. 4, pp. 221–225, 2022, [Online]. Available: <https://www.jurnal-adhikari.id/index.php/adhikari>

- [3] E. Andina, "Peran Pemerintah Daerah dalam Implementasi Program Kartu Prakerja di Provinsi Jawa Barat," *Aspir. J. Masal. Sos.*, vol. 13, no. 1, pp. 37–56, 2022, doi: 10.46807/aspirasi.v13i1.2994.
- [4] D. K. Hardjanti, "Efektivitas Dan Optimalisasi Dua Periode Pemerintahan Presiden Republik Indonesia Ke Tujuh: Joko Widodo," *Konf. Nas. Asos. Pengajar Huk. Tata Negara dan Huk. Adm. Negara*, vol. 2, no. 1, pp. 283–316, 2024, doi: 10.55292/h4csb423.
- [5] A. A. Renanda and A. Rosidin, "Efektivitas Pelayanan Digital Dalam Mempermudah Birokrasi Dan Pengelolaan Data Publik," *J. Penelit. Multidisiplin Bangsa*, vol. 1, no. 8, pp. 1651–1657, 2025, doi: 10.59837/jpnmb.v1i8.310.
- [6] A. A. Faturahman, A. M. S. Mubarak, I. Marta, R. Fauzi, and M. A. Septian, "Dampak Positif dan Negatif Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN)," *J. Perenc. Wil. Dan Pembang.*, vol. 2, no. 1, pp. 17–29, 2024, [Online]. Available: <https://www.inilah.com/dampak-positif-dan-negatif-pemindahan-ibu-kota-negara>
- [7] Nurdayati dkk, "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析Title," vol. 3, no. 5, p. 6, 2021.
- [8] H. Jurnal, I. Hukum, N. Februari, T. S. Kamila, and U. G. Mada, "Komparasi Kebijakan Pemerintah Masa Kepemimpinan Jokowi Periode Pertama Dan Kedua Dilihat Dari Teori Utilitarian," vol. 2, no. 1, 2024.
- [9] Y. Fatmariyanti and A. Fauzi, "Kebijakan Publik Versi William Dunn: Analisis Dan Implementasi," *J. Humanit. Soc. Stud.*, vol. 1, no. 1, pp. 1–9, 2023.
- [10] S. Syahrani and A. Gunawan, "Efektivitas Program Kartu Prakerja dalam Membangun Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Skill," *Glob. J. Lentera BITEP*, vol. 1, no. 3, pp. 118–126, 2023, [Online]. Available: <https://lenteranusa.id/>
- [11] R. A. Mawardi, "Dilema Pembangunan di Indonesia: Analisis Mengenai Dampak dan Implikasi Kebijakan Pembangunan Era Presiden Joko Widodo," *J. Mengkaji Indones.*, vol. 2, no. 1, pp. 39–62, 2023, doi: 10.59066/jmi.v2i1.246.
- [12] A. Jonathan and F. Alfando, "Teman dan Persoalan Hubungan Toxic Dalam Pandangan Etika Persahabatan Aristoteles," *J. Filsafat Terap.*, vol. 1, no. 1, pp. 45–58, 2022, doi: 10.11111/moderasi.xxxxxxx.
- [13] H. Priyanti, R. Dewi, T. Aisyah, and M. Hasyem, "Implementasi E-Government Berbasis Online Single Submission (OSS) Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Digital," vol. 10, no. 3, pp. 579–593, 2025.
- [14] V. A. Grasia, S. A. Tjandra, and V. L. Setiawan, "Transformasi Ekonomi: Menggali Potensi Investasi Tiongkok di Smelter Nikel Indonesia," *Parahyangan Econ. Dev. Rev.*, vol. 3, no. 1, pp. 247–257, 2025, doi: 10.26593/pedr.v3i1.7507.
- [15] A. B. P, P. M. R. Kurniawan, Trismadi, and A. A. Lestari, "Kepemimpinan Strategis di Masa Pemerintahan Joko Widodo Dalam Menyelesaikan Pandemi Covid-19 di Indonesia Untuk Mendukung Pertahanan Negara," *J. Kewarganegaraan*, vol. 7, no. 2, pp. 2594–2597, 2023, [Online]. Available: <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/5895>
- [16] I. Sumiarsa, H. Hidayat, S. N. Azijah, Y. Supendi, M. H. Maruapey, and A. S. Sudarsa, "Evaluasi Kepemimpinan Presiden Joko Widodo Menjelang Akhir Masa Jabatan," *Minist. J. Birokrasi dan Pemerintah. Drh.*, vol. 5, no. 2, pp. 227–232, 2023, doi: 10.15575/jbpd.v5i2.27007.
- [17] D. D. N. Nadila, "EVALUASI KEBIJAKAN KURIKULUM MERDEKA DENGAN MENGGUNAKAN MODEL WILLIAM DUNN Daryati Dewi Nur Nadila," *JPSS J. Pendidik. Sang Surya*, vol. 9, no. 1, p. 2023, 2023.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.